

Determinasi Investasi Bidang Kelistrikan dan Implikasinya Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah

Oleh : Syahrizal Syah Siregar

Alumni Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur

ABSTRACT

Management and distribution of electricity in the province of Central Java is totally accomplished by PLN, the State Company for Electricity. As a state company, PLN has not yet fulfilled all the electricity needs to support the infrastructures in the province of Central Java. There is a gap between available electrical resources and the actual needs. Expansion of investment that involves stakeholders is highly needed ; and yet, the investors are facing problems.

Based on the problems, this research was conducted from the perspective of macro economics interrelated with investment in electricity sectors. The research operationally studied the effect on interest rate, exchange rate, per capita of product of Domestic Bruto (PDRB), inflation rates, the government expenditures, available of infrastructure, Investment on electricity sector, and economics growth rate on the regional revenues and employment absorption in the province of Central Java.

Research method employed for this research was a survey model and was functioned to explain the effect of number of independent variables on the dependent variable. There were several research models explained in this research scientifically through hypothesis testing. The research data were of secondary that consisted of quarterly data for period of 11 years from 2005 to 2015. The data were analysed through statistical analysis of Multiple linear regression with Ordinary Least Square (OLS) model.

Research finding showed that on the model 1 there was a significant simultaneous effect of interest rate, exchange rate, per capita PDRB, inflation rates, the government expenditures, available of infrastructure, Investment on electricity sector. For the partial effect, all dependent variables were having a significant effect on the dependent variables except interest rates. On the model 2 there was a significant effect investment of economic growth on the regional revenues and employment absorption in the province of Central Java.

Key words : Interest Rates, Exchange Rates, per capita of PDRB, inflation rates, the government expenditure, availability of infrastructure, investment in electricity sector, and economic growth rate, the regional revenues, employment absorption.

PENDAHULUAN

Kontribusi yang besar dari sektor sekunder dan tersier tidak terlepas dari kebutuhan energi dan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan 2012 berdasarkan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 kebutuhan energi masih tergantung kepada sumber energi

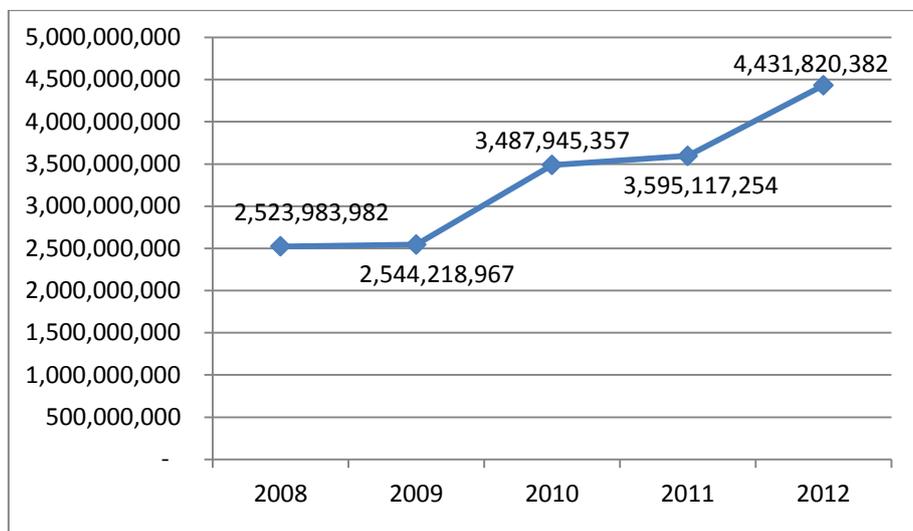
fosil yaitu minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Dengan komposisi pemakaian sebesar 63.60 persen untuk minyak bumi, 11.47 persen untuk gas bumi dan 21.28 persen untuk batu bara. Sampai dengan saat ini pemakaian energi baru terbarukan masih relative kecil, hanya sebesar 3.65 persen. Terbatasnya ketersediaan sumber energi

fosil merupakan salah satu permasalahan dari penggunaan sumber energi fosil dalam pengadaan sumber energi sehingga perlu dikembangkannya sumber energi baru terbarukan.

Permasalahan lain adalah pelayanan energi (listrik dan migas) yang masih terbatas dan belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Belum optimalnya pelayanan listrik bagi masyarakat terlihat masih adanya 1.784.430 KK yang belum menikmati listrik dan tersebar di 4.175 dusun, walaupun rasio elektrifikasi Jawa Tengah Tahun 2012 sudah mencapai 79,98%, di atas rata-rata rasio elektrifikasi nasional sebesar 75,2%. Hal tersebut terjadi terutama di wilayah pedesaan yang belum terlayani oleh pasokan listrik, yang menunjukkan bahwa infrastruktur energi masih perlu ditingkatkan, dengan

mengupayakan pembangunan jaringan listrik pedesaan serta mengembangkan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi.

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan roda perekonomian daerah. Jumlah energi listrik yang terjual selama tahun 2013 sebesar 18.205.067 MWh atau meningkat 9,67 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya. Sampai dengan saat ini Energi listrik tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh rumah tangga (93,80 persen), berikutnya untuk usaha (3,14 persen), selebihnya untuk industri, kantor pemerintah, penerangan jalan dan sosial. Kebutuhan energi listrik yang dibeli untuk usaha mengalami peningkatan sejak tahun 2008 sebesar Rp. 2,523,983,982 menjadi Rp.4,431,720,382 pada 2012.



Gambar 1. Grafik Jumlah Listrik Yang Dibeli Untuk Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012, Sumber: JDA 2014, BPS Jateng 2014)

Peningkatan kebutuhan listrik tersebut timbul akibat peningkatan output dari sektor sekunder, terutama industri pengolahan yang mempunyai kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Untuk mengatasi kekurangan dari tersedianya

pasokan listrik, saat ini Jawa Tengah telah mengembangkan sumber-sumber energi non fosil atau EBT untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat seperti Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), *solar cell*, biogas, biomassa, dan *biofuel*,

namun pemanfaatannya dalam bauran energi Tahun 2012 masih sebesar 3,65%. Pengelolaan energi baru terbarukan juga masih terdapat masalah karena belum optimalnya kelembagaan (RPJMD Jawa Tengah 2013-2018). Dengan adanya pengembangan optimal diharapkan akan dapat mengurangi beban ketergantungan pasokan listrik dari PLN untuk masyarakat sehingga dapat dialihkan ke sektor industri.

Dalam rangka pengembangan energi listrik tidaklah lepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah investasi. Investasi sendiri merupakan modal utama dalam mengembangkan suatu produksi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Investasi sektor energi merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan ekonomi. Keterbatasan energi yang bersumber dari energi fosil seperti minyak bumi dan gas alam merupakan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan energi, sehingga harus dialihkan kepada sumber energi yang terbarukan. Salah satu sumber energi terbarukan adalah energi listrik yang bersumber pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sampai dengan 2015 pasokan listrik untuk Jawa-Bali masih kurang sekitar 1000 MW pada saat beban puncak sistem kelistrikan Jawa-Bali sekitar 23.900 MW, sehingga pemadaman bergilir untuk beberapa daerah masih harus dilakukan (Tempo, 2016).

Perizinan prinsip investasi sektor kelistrikan menurut BPKM Indonesia sampai dengan September 2015 ada

sebanyak 88 Penanam Modal Asing (PMA) dan 66 Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total nilai investasi sebesar 591.81 Triliun Rupiah dan estimasi kapasitas pembangkit listrik secara total sebesar 5,127.73 Megawatt (MW) (CNN Indonesia, 2016). Dengan banyaknya investasi pada sektor kelistrikan diharapkan dapat memicu output dari sektor lainnya karena sektor kelistrikan adalah sektor mendasar dalam perekonomian modern. Dengan kebutuhan sekitar 150 Terawatt hour (TWh) pada tahun 2015 wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi pemakai energi listrik terbanyak di Indonesia (Muchlis dan Permana, 2003). Kebutuhan ini akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi di wilayah Jamali. Muchlis dan Permana (2003) mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan listrik wilayah Jamali pada 2020 adalah sebesar 203.19 TWh yang berarti dalam kurun waktu 5 tahun kebutuhan akan pasokan listrik meningkat sebesar 35.46%.

Investasi sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah masih dapat dikatakan sangat minim. Dalam hal untuk meningkatkan pendapatan daerah Jawa Tengah dibutuhkan peran serta sektor swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal untuk membangun daerah ini.. Sebagai pedoman perencanaan guna meningkatkan pembangunan di daerah Jawa Tengah pemerintah harus menggunakan metode pembangunan dari bawah ke atas agar pembangunan ekonomi di daerah ini bisa berkelanjutan dan sesuai dengan harapan.

Pada dasarnya investasi sektor kelistrikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tentu saja menyebabkan meningkatnya

pergerakan orang maupun barang. Ketersediaan Infrastruktur jalan dan ketersediaan listrik di Jawa Tengah harus mampu memfasilitasi semakin meningkatnya pergerakan orang dan barang tersebut. Keberadaan infrastruktur jalan dan ketersediaan listrik menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Salah satu kendala pelaksanaan investasi sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya keterbatasan jalan yang menuju lokasi proyek pembangkit listrik dan jaringan instalasi distribusi listrik, bahkan di beberapa daerah terpaksa investor terlebih dahulu membangun infrastruktur jalan terlebih dahulu.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, faktor makro ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi investasi. Salah satu faktor makro ekonomi yang cukup mempengaruhi yaitu Inflasi yang tinggi, Suku bunga yang terlalu tinggi. Nilai Tukar, PDRB per kapita, Besaran Pengeluaran pemerintah.

Menurut Ruch, Fearon dan Winters dalam Novianto (2009 : 8), tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses produksi. *“Production/operation cannot function without people. The human resources function is to recruitment train workers to fill production process according to the job design and skill assessment performed by work-study analyst”*

Tabel 1. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2013

| Tahun | Lapangan Kerja | | | |
|-------|----------------|--|-----------|------------|
| | Pertanian | Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih | Industri | Konstruksi |
| 2009 | 5,864,827 | 147,997 | 2,656,673 | 1,028,429 |
| 2010 | 5,616,529 | 136,625 | 2,815,292 | 1,046,741 |
| 2011 | 5,376,452 | 108,592 | 3,046,724 | 1,097,380 |
| 2012 | 5,064,377 | 117,772 | 3,297,707 | 1,207,067 |
| 2013 | 4,926,629 | 87,143 | 3,044,428 | 950,578 |

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS Jawa Tengah 2014

Berdasarkan Tabel 1.juga dapat dilihat bahwa sektor industri adalah satu-satunya sektor yang memiliki trend positif. Tidak dapat dipungkiri lagi, listrik merupakan salah satu input penting bagi sektor industri, karena sebagian besar peralatan industri menggunakan energi listrik sebagai energi utamanya. Trend positif ini haruslah dapat dimanfaatkan

sebagai peluang oleh provinsi Jawa Tengah, terlebih sektor industri merupakan sektor unggulan provinsi Jawa Tengah sebagai pemberi kontribusi terbesar perekonomiannya. Adanya peningkatan produktivitas sektor industri tentunya akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, PDRB per kapita, Tingkat

Inflasi, Besaran Pengeluaran pemerintah, dan Ketersediaan Infrastruktur secara simultan terhadap

investasi sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagaimana pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, PDRB per kapita, Tingkat Inflasi, Besaran Pengeluaran pemerintah, dan Ketersediaan Infrastruktur secara parsial terhadap investasi sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagaimana pengaruh investasi sektor **Ekonomi Pembangunan dan Teori Pembangunan Ekonomi**

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets dalam Jhingan, (2000, h.57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Dimana faktor ekonomi terdiri dari : Sumber Daya Alam, Akumulasi Modal, Organisasi. Kemajuan

kelistrikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

4. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.

5. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

BAHAN DAN METODE

Teknologi. Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Sedangkan faktor non ekonomi : Faktor Sosial, Faktor Manusia.

Teori Investasi dan Teori Investasi Industri.

Menurut Sadono Sukirno (2003,h.45), investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi ada 2 Macam, yaitu ; 1) Outonomous Invesment (Investasi Tetap),dimanainvestasi tetap adalah investasi yang besarnya tidak tergantung pada besar nya pendapatan.2). Inoced Invesment (Investasi Terpacu), dimana investasi terpacu adalah investasi yang besarnya tergantung pada pendapatan.

Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasi tersebut yang dapat berupa capital gain/loss dan yield. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki.

Pendekatan secara fundamental mendasarkan analisisnya pada suatu anggapan bahwa setiap saham mempunyai nilai intrinstik dihasilkan. Salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu

apabila semakin rendah harga suatu saham maka semakin bagus untuk melakukan investasi, hal tersebut dikarenakan harga saham terjangkau oleh kemampuan investor dan memiliki nilai resiko yang kecil. Perhitungan Investasi harus konsisten dengan perhitungan pendapatan nasional, dimana yang dimasukkan dalam perhitungan investasi adalah barang modal, bangunan / konstruksi, maupun persediaan barang jadi yang masih baru.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Investasi :

1. Tingkat pengembalian yang diharapkan (Expected Rate Of Return),
2. Biaya investasi, 3. Marginal efficiency of capital (MEC), tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment (MEI)

Teori Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sommerfeld Rey M, Anderson Herschel M, Brock Horace, dalam Moch, Zain 2005 ” *Any non final yet compulsoty transfer of recourses from privte to public sector, levied on the basis of preditermined criteria and without receipt of special benefit of equal value in order to accomplish some of nation’s economic and social obyectives* “ Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jenis – jenis Pajak, terdiri dari : Pajak pusat dan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah. Menurut Abdul Halim (2004:94), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: 1) Pajak Daerah, terdiri dari : a.Pajak Provinsi, b.Pajak Kabupaten/ Kota, 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perinaan Tertentu. 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan

Teori Ketenagakerjaan.

Payaman J. Simanjuntak dalam (Rustiono, 2008,h.33), menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi Santosa, dalam Rustiono, (2008,h.34), jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi yang lain seperti tanah, modal dan lain-lain. Maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi).

Kualitas kesempatan kerja mengacu pada kualitas sumberdaya manusia (Matutina, 2001:205), yaitu: 1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. 2. Keterampilan (*skill*), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan. 3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2006, h. 124).

Usaha perluasan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dapat dilakukan dengan dua cara: 1. Pengembangan industri yaitu jenis industri yang sifatnya padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam industri termasuk industri rumah tangga. 2. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum, misalnya pembuatan saluran air, bendungan, jembatan.

Teori Nilai Tukar

Nilai Tukar Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar Negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut nilai tukar valuta asing atau nilai tukar (Mankiw N Gregory, 2012, h.145).

Nilai tukar terbagi atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai riil (*real exchange rate*) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain (Mankiw N Gregory, 2012, h.146).

Nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat inflasi, dan intervensi bank central terhadap pasar uang. Nilai tukar yang lazim disebut nilai tukar, mempunyai peran penting dalam rangka stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk tercapainya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dunia usaha. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, bank central pada waktu-waktu tertentu melakukan intervensi di pasar-pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak yang berlebihan.

Teori Tingkat Suku Bunga

Menurut Kasmir, (2002, h.121) suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan Sadono Sukirno (2006, h.375) menyatakan suku bunga

adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentasi dari modal.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu : 1. Bunga Simpanan, dan 2. Bunga Pinjaman. Suku bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu : 1. Membantu mengalirkan tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. 2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. 3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. 4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Kasmir (2002, h.122) faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah: 1. Kebutuhan dana, 2. Persaingan, 3. Kebijakan Pemerintah, 4. Target laba yang diinginkan, 5. Jangka waktu, 6. Hubungan baik.

Teori Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Dalam memahami konsep inflasi, kenaikan harga yang terjadi adalah kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode waktu tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dengan persentase yang cukup besar, bukan merupakan inflasi.

Menurut Nugroho (2008, h.12), secara garis besar ada tiga kelompok teori inflasi, masing-masing teori ini menyatakan aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan

harga. Ketiga teori itu adalah: teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis.

Menurut Nopirin dalam Harjaputra (2009, h.:41), menjelaskan Jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya antara lain: 1. *Demand-pull inflation*, 2. *Cost Push Inflation*,

Selain itu menurut Mankiw N Gregory, (2012, h.143) inflasi menyebabkan beberapa biaya sosial dalam perekonomian baik inflasi yang diharapkan maupun inflasi yang tidak diharapkan yaitu: penurunan jumlah uang yang dipegang sehingga menimbulkan *shoeleather cost* dari inflasi, mendorong perusahaan lebih sering mengubah harga, dimana akan menambah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, menimbulkan distorsi dalam pajak yang dibebankan, menimbulkan ketidaknyamanan hidup dengan seringnya terjadi perubahan harga, terjadinya redistribusi kekayaan antar individu, dan menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dan debitor.

Teori Infrastruktur

Menurut Stone dalam Kodoatie (2003, h. 34) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem

sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003, h. 35).

The World Bank dalam Prasetyo dan Firdaus (2009, h. 225), membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu: 1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). 2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. 3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Kodoatie, R.J. (2003, h. 38), menyatakan terdapat 9 (sembilan) bentuk Infrastruktur sebagai berikut : 1. Infrastruktur Transportasi, 2. Infrastruktur Produksi, 3. Infrastruktur Pemasaran, 4. Infrastruktur Air Bersih, 5. Infrastruktur Pendidikan, 6. Infrastruktur Kesehatan, 7. Infrastruktur Jalan. 8. Infrastruktur Listrik, dan 9. Infrastruktur Telepon

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesubroto, (2008:169) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap

kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Beberapa bentuk Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah, diantaranya : 1. Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow, 2. Teori Hukum Wagner. 3. Pengeluaran Pemerintah Keynes, 4. Teori Peacock dan Wiseman.

Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlakudan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Kegunaan PDRB, dimana Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah: 1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.³ Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam satu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis ekonomi satu wilayah. 4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk, 5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Kerangka Pemikiran

Variabel – variabel Penelitian.

Variabel yang relevan dalam model penelitian yang diajukan adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat (*dependent variable*) yang merupakan outcome. Kemudian Investasi Sektor Kelistrikan, Pendapatan Asli Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel antara (*intervening variable*) yang merupakan output. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi (*independent variable*) : Investasi Sektor Kelistrikan, yakni Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Ketersediaan Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB perkapita sebagai variabel bebas yang merupakan input.

Mudradjat Kuncoro (2004, h.23), Investasi merupakan salah satu faktor utama bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi..Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan

belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Keterkaitan di Antar Variabel.

Pengaruh Nilai Tukar terhadap Investasi Sektor Kelistrikan

Nilai tukar maka mempunyai dampak negatif terhadap investasi, artinya semakin tinggi nilai tukar maka besaran investasi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi negatif antara nilai tukar dan investasi (Kodoatie 2003, h. 23).

Meski pengeluaran non-pembangunan memiliki dampak positif terhadap investasi, pengeluaran non-pembangunan sendiri memiliki dampak negatif terhadap kekurangan anggaran, nilai tukar, pajak masa yang akan datang dan tidak memberi dampak terhadap pertumbuhan investasi (Mudrajat, 2004, h. 25).

Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Investasi Sektor Kelistrikan

Tingkat suku bunga mempunyai dampak negatif terhadap investasi, artinya semakin tinggi tingkat suku bunga maka investasi akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi negatif antara tingkat suku bunga dan investasi (Mudradjat Kuncoro, 2005,h.89).

Menurut Sadono Sukirno (2007, h. 87), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi, diantaranya : suku bunga, produk domestik bruto dan besaran pengeluaran pemerintah. Meningkatnya tingkat bunga akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran investasi, dan sebaliknya menurunnya

tingkat bunga akan mengakibatkan bertambahnya pengeluaran investasi.

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Investasi Sektor Kelistrikan

Tingkat inflasi mempunyai dampak negatif terhadap investasi, artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka investasi akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi negatif antara tingkat inflasi dan investasi (Sadono Sukirno, 2007, h. 88)

Menurut Greene dan Pillanueva dalam Mudrajat (2005), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur terhadap Investasi Sektor Kelistrikan

Ketersediaan infrastruktur mempunyai dampak positif terhadap investasi, artinya semakin tinggi ketersediaan infrastruktur maka investasi akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi positif antara ketersediaan infrastruktur dan investasi (Shifa, 2014)

Infrastruktur juga merupakan salah satu faktor yang menentukan investasi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Infrastruktur dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni ekonomi, sosial dan

administrasi. Infrastruktur ekonomi terdiri dari public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). Beberapa infrastruktur dalam jenis infrastruktur ekonomi dinilai dapat mempengaruhi suatu investasi. Infrastruktur yang dinilai akan memberikan pengaruh adalah jalan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Sektor Kelistrikan

Pengeluaran pemerintah mempunyai dampak positif terhadap investasi, artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka investasi akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan investasi (Ahmad, 2008)

Pengeluaran pemerintah disini adalah meliputi semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan roda perekonomian agar berjalan lebih baik dan bersemangat. Peran pemerintah seperti dikemukakan oleh Keynes sering kali diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

Pengaruh PDRB perkapita terhadap Investasi Sektor Kelistrikan

PDRB perkapita mempunyai dampak positif terhadap investasi, artinya semakin tinggi PDRB perkapita maka investasi akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi positif antara PDRB perkapita dan investasi (Sadono Sukirno, 2007, h. 89),

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari

daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

Pengaruh Investasi Kelistrikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan di daerah pada dasarnya untuk mencapai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya, artinya secara khusus peningkatan pembangunan sektor kelistrikan di Jawa tengah, akan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi positif antara Investasi sektor kelistrikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu, peningkatan *output* dari sektor – sektor lainnya akan mampu memberikan dampak pada laju pertumbuhan ekonomi. (Samuelson, Paul A. William D. Nordhaus. 2004, dan Mardiasmo, 2007).

Pengaruh Investasi Kelistrikan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Permasalahan utama pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yaitu pengangguran merupakan masalah yang rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan. Kondisi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dari pada pertambahan penduduk. Apabila hal ini tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menambah tingkat kemiskinan.

(Siswosoemarto, 2012:460-461).

Investasi sektor kelistrikan mempunyai dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya semakin tinggi investasi sektor kelistrikan maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat korelasi positif antara investasi sektor kelistrikan dan penyerapan tenaga kerja (Sadono Sukirno, 2007, 90).

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Laju Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini berarti, semakin tinggi Laju Pertumbuhan Ekonomi maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat pengaruh positif antara Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah dan (Mardiasmo, 2007 dan Siswosoemarto, 2012:465)

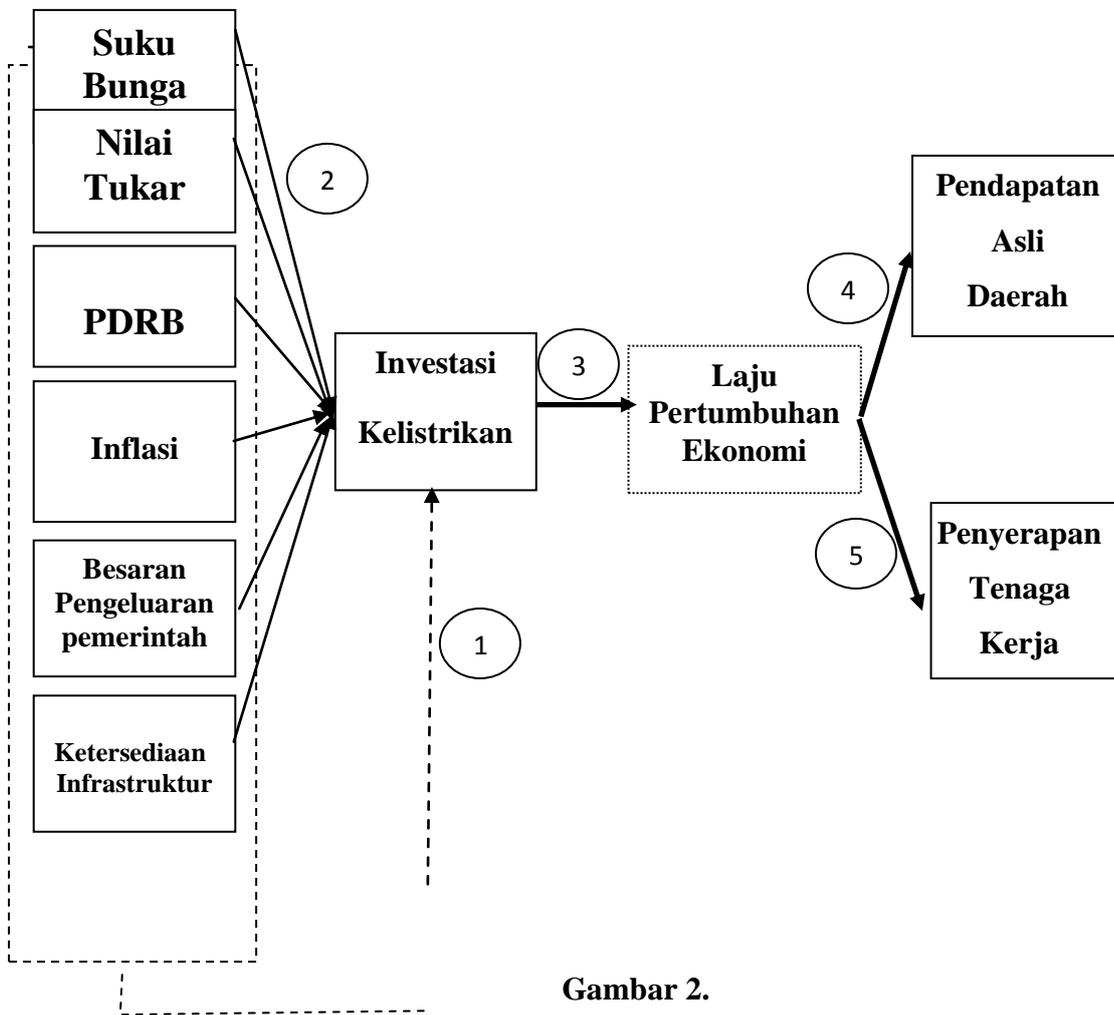
Pengaruh LPE terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap, penyerapan tenaga kerja, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Sehingga diasumsikan terdapat pengaruh positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja (Sobita, 2013; Nurrohman, 2012)

Investasi yang dikeluarkan ini secara langsung dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan memperbesar pengeluaran masyarakat. Disamping itu Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau

pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi

masyarakat. Dalam hal ini, jumlah pengangguran tentunya akan turun.



Gambar 2.
Paradigma Penelitian

Hipotesis Penelitian

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel : Suku Bunga, Nilai Tukar, PDRB per kapita, Tingkat Inflasi, Besaran Pengeluaran pemerintah, dan Ketersediaan Infrastruktur secara simultan terhadap investasi sektor kelistrikan.
2. Terdapat pengaruh positif dari variabel : Suku Bunga, Nilai Tukar, PDRB per kapita, Tingkat Inflasi, Besaran Pengeluaran pemerintah, dan

Ketersediaan Infrastruktur secara parsial terhadap investasi kelistrikan.

3. Terdapat pengaruh positif besaran investasi sektor kelistrikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
4. Terdapat pengaruh positif besaran laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan asli daerah
5. Terdapat pengaruh positif besaran laju pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory study* atau *hypothesis*

testing study, yakni penelitian hipotesis melalui suatu penjelasan, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis

tentang hubungan antar-variabel. Hubungan yang dijelaskan adalah hubungan kausal (sebab-akibat) atau pengaruh dari faktor-faktor Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Ketersediaan Infrastruktur,

Besaran Pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi /Kabupaten/ Kota di Jateng secara simultan terhadap investasi sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah.

Operasional Variabel

Tabel 2. Operasional Variabel penelitian

| No | Variabel | Indikator | Skala | Jenis data |
|----|---|---|-------|------------|
| 1 | Tingkat Suku Bunga, (X_1) | Suku bunga nominal pinjaman rata-rata | Rasio | Sekunder |
| 2 | Nilai Tukar, (X_2) | Nilai tukar mata uang rupiah | Rasio | Sekunder |
| 3 | PDRB per kapita untuk tingkat propinsi (X_3) | Besarnya PDRB pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah pada tiap tahunnya | Rasio | Sekunder |
| 4 | Tingkat Inflasi, (X_4) | Rata-rata Inflasi Nasional | Rasio | Sekunder |
| 5 | Besaran Pengeluaran pemerintah, (X_5) | Besarnya pengeluaran pemerintah yang diperuntukan untuk investasi infrastruktur | Rasio | Sekunder |
| 6 | Ketersediaan Infrastruktur (X_6) | Panjang jalan yang berada dalam kategori layak | Rasio | Sekunder |
| 7 | Investasi kelistrikan (Y_1) | Besaran investasi kelistrikan yang dilakukan di Provinsi Jawa tengah | Rasio | Sekunder |
| 8. | Laju pertumbuhan ekonomi (Y_2) | Besaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai tiap tahunnya di Provinsi Jawa tengah. | Rasio | Sekunder |
| 8 | Pendapatan Asli Daerah (Z_1) | Nilai Pendapatan Asli Daerah tiap tahun di Provinsi Jawa tengah | Rasio | Sekunder |
| 9 | Kesempatan Kerja (Z_2) | Jumlah tenaga kerja yang terserap tiap tahun di Provinsi Jawa tengah | Rasio | Sekunder |

Sumber: Diolah

Pengujian Instrumen Penelitian

Metode analisis yang digunakan untuk pengujian Pengujian instrumen meliputi uji : 1). Uji Normalitas, 2). Uji Multikolonieritas. 3). Uji Heteroskedastisitas, 4). Uji Autokorelasi.

(*dependend variable*) secara langsung (tidak menggunakan variabel antara/*intervening variable*), maka digunakan pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier (*linear regression analysis*),

Metode Analisis Data

Mengingat hubungan kausal antara X (*independent variable*) dengan Y

Model Penelitian Regresi Linear

Struktur Model kesatu.

Adapun persamaan strural kesatu, adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4)$$

$$Y = \beta_{01} + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_4 X_4 + \beta_4 X_4 + \epsilon_1$$

Dalam penelitian ini, model yang digunakan yaitu menggunakan Ln, sehingga model penelitian menjadi seperti berikut :

$$\text{Ln Inv} = f (\text{Ln TSB}, \text{Ln N T}, \text{Ln PDRB}, \text{Ln T I}, \text{Ln BPPem}, \text{Ln K I})$$

Dimana :

X 1 = Suku Bunga

X 2 = Nilai Tukar

X 3 = PDRB per kapita Jawa Tengah

X 4 = Inflasi

X 5 = Besaran Pengeluaran Pemerintah

X 6 = Ketersediaan Infrastruktur

β_{ixi} = Hubungan Variabel Independen

(X_i) dengan Dependen (y)

dimana $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

ϵ_1 = error untuk struktur model kesat

Struktur Model kedua.

Berdasarkan variabel Penelitian yang terdiri dari variabel Bebas Y (variabel independen) dan variabel terikat Z 1 (variabel dependen), maka dapat dibuat dalam Model Penelitian sebagai berikut:

Sedangkan implikasi investasi kelistrikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Ln LPE} = f (\text{Ln Inv})$$

$$\text{Ln LPE} = \beta_{01} + \beta_{11} \text{Ln Inv} + \epsilon_2$$

Keterangan :

Ln Inv = Lon Investasi Kelistrikan

Ln PAD = Lon Laju Pertumbuhan Ekonomi

β_{01} = Konstanta

β_{11} = Koefisien regresi Investasi

Kelistrikan

ϵ_2 = Error / Residual Tes

Struktur Model ketiga.

Berdasarkan variabel Penelitian yang terdiri dari variabel Bebas Z 1 (variabel independen) dan variabel terikat Z 2 (variabel dependen), maka dapat dibuat dalam Model Penelitian sebagai berikut:

Sedangkan implikasi laju pertumbuhan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Ln PAD} = f (\text{Ln LPE})$$

$$\text{Ln PAD} = \beta_{02} + \beta_{12} \text{Ln LPE} + \epsilon_3$$

Keterangan :

Ln LPE = Lon Laju pertumbuhan ekonomi

Ln PAD = Lon Pendapatan asli daerah

β_{01} = Konstanta

β_{12} = Koefisien regresi laju pertumbuhan ekonomi

ϵ_3 = Error / Residual Tes

Struktur Model keempat.

Berdasarkan variabel Penelitian yang terdiri dari variabel Bebas Z 1 (variabel independen) dan variabel terikat Z 2 (variabel dependen), maka dapat dibuat dalam Model Penelitian sebagai berikut:

Sedangkan implikasi laju pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Ln PTK} = f (\text{Ln LPE})$$

$$\text{Ln PTK} = \beta_{03} + \beta_{13} \text{Ln LPE} + \epsilon_4$$

Keterangan :

Ln LPE = Lon Laju pertumbuhan ekonomi

Ln PTK = Lon Penyerapan tenaga kerja

β_{03} = Konstanta

β_{13} = Koefisien regresi laju pertumbuhan ekonomi

ϵ_4 = Error / Residual Tes.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) atau Koefisien Penentu (KP) digunakan untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi X terhadap nilai Y, atau untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) bermanfaat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan pengujian secara bersama-sama (Simultan) dan secara satu persatu (parsial) Sebagai berikut:

- 1) Pengujian Hipotesis 2 (Secara Parsial)
Pengujian hipotesis antara variabel X terhadap variabel Y

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari

$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel X terhadap variabel Y.

Kriteria uji: Tolak Hipotesis, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P_{value} < 0,05$.

Pengujian Kelayakan Model

Model penelitian yang baik dipersyaratkan harus memenuhi karakteristik yang ditetapkan pada suatu model ekonometrik (*the goodness of an econometric model*) (Koutsoylannis dalam Yuyun Wirasmita, 2007) dengan syarat: Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi *the goodness of an econometric model* atau karakteristik yang dapat diharapkan, adapun perinciannya sebagai berikut:

1) *Theoretical plausibility*

Apakah hipotesis-hipotesis dalam model penelitian pasca estimasi dan

$H_0: \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh secara parsial Variabel bebas (X_1) terhadap Variabel terikat (Y).

$H_1: \beta_i \neq 0$: Terdapat pengaruh secara parsial Variabel bebas (X_i) terhadap Variabel terikat (Y).

dimana $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$,

Adapun kriteria uji: tolak hipotesis (H_0), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau P_{value} .

- 2). Pengujian Hipotesis 2 (Secara Simultan) Pengujian hipotesis secara bersamaan (Pengujian Simultan)

pasca uji hipotesis, sesuai dengan ekspektasi hipotesis pra-estimasi dan didukung oleh postulat atau teori yang relevan.

2) *Accuracy of estimates of the parameters*

Apakah parameter-parameter hipotesis atau model pasca estimasi dan uji akurat atau bersifat tidak bias, dengan tingkat kesalahan statistik ($p\text{-value} = 0,05$) yang rendah.

3) *Explanatory ability*

Apakah model pasca estimasi dan uji model memiliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan antar fenomena ekonomi yang menunjukkan bahwa model memiliki standar error estimasi

(SE) yang rendah, dimana $SE < 0,50$ nilai estimasi parameternya.

4) *Forecasting ability*

Apakah model pasca estimasi dan uji model memiliki kemampuan memprediksi keadaan dimasa

mendatang, yaitu apa bila koefisien diterminasi $R^2 > 0,50$. Sistem pengolahan seluruh data pada penelitian ini menggunakan dasar perhitungan ekonometrik dengan program software Eviews.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengembangkan pengadaan energi baru terbarukan (EBT) dalam mendukung pembangunan ekonomi daerahnya. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang ada saat ini adalah pelayanan energi (listrik dan migas) yang masih terbatas dan belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 bahwa pembangunan sumber energi guna mendukung pembangunan ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan jaringan listrik pedesaan serta mengembangkan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi menjadi fokus dalam pengembangan sektor kelistrikan.

Sampai dengan 2014 data dari PLN regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah mengalami kekurangan pasokan listrik sebanyak 4,000 MW dan untuk mengurangi kekurangan tersebut Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan sumber listrik dari interkoneksi Jawa-Bali padahal interkoneksi Jawa-Bali tidak hanya memasok kebutuhan untuk daerah Jawa Tengah saja. Investasi pada sektor

kelistrikan menjadi salah satu jenis investasi yang harus dikedepankan guna memenuhi kebutuhan listrik Jawa Tengah di masa yang akan datang. Kelistrikan sendiri merupakan input bagi berbagai sektor ekonomi karena listrik adalah salah satu sumber energi yang dimanfaatkan oleh sektor lain dalam menjalankan roda perekonomian.

Program pembangunan bidang kelistrikan di Jawa Tengah, meliputi upaya:

- 1) Memfasilitasi pengusaha untuk berinvestasi dalam sector kelistrikan, yang meliputi; Pembangunan pusat pembangkit listrik, pembangunan jaringan transmisi, dan pembangunan aspek pendukung lainnya.
- 2) Peningkatan peran pemerintah dan PLN, sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
 - a) Pembangunan pusat listrik tenaga air (PLTA), pusat listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), dan pusat listrik tenaga panas bumi (PLTP)
 - b) Peningkatan sarana distribusi PLN berupa jaringan transmisi sepanjang 1.753 kilometersirkuit, gardu induk sebanyak 56 unit dengan kapasitas 3.070 megavoltampere.
 - c) Penyediaan tenaga listrik perdesaan diperluas, antara lain menggunakan minihidro sehingga diperoleh tambahan pelayanan listrik bagi 1.761 desa,

1. Investasi Kelistrikan

Variabel investasi kelistrikan diproksikan dengan besaran investasi sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Rupiah. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh : nilai rata-rata besar Investasi Kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 353,079,545.45 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 69,380,790.62. Investasi kelistrikan terendah adalah sebesar Rp.189,500,000.00 yaitu pada kuartal ketiga tahun 2005 dan investasi kelistrikan tertinggi adalah sebesar Rp.422,250,000.00 yaitu pada kuartal ketiga tahun 2013.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, investasi kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan.

2. Suku Bunga

Variabel Suku Bunga diproksikan dengan besaran bunga pinjaman kredit pada Bank di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan persen.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh : nilai rata-rata besar Suku Bunga di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 7.38% dengan nilai standar deviasi sebesar 1.36%. Suku Bunga terendah adalah sebesar 4.20% yaitu pada kuartal keempat tahun 2015 dan Suku Bunga adalah sebesar 10.70% yaitu pada kuartal kedua tahun 2005.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Suku Bunga di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana nilai suku bunga mempunyai besaran yang sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh belum baiknya perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan fluktuasi pada nilai suku bunga.

3. Nilai Tukar

Variabel Nilai Tukar diproksikan dengan besaran nominal nilai tukar rupiah terhadap US Dolar di Indonesia dengan satuan Rupiah.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai rata-rata besar Nilai Tukar di Indonesia adalah sebesar Rp. 10,350.94 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp.1,605.62. Nilai Tukar terendah adalah sebesar Rp.7,852.76 yaitu pada kuartal pertama tahun 2006 dan Nilai Tukar tertinggi adalah sebesar Rp. 13,229.42 yaitu pada kuartal pertama tahun 2015.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Nilai Tukar di Indonesia mengalami pertumbuhan. Dimana Nilai Tukar mempunyai besaran yang sangat fluktuatif dan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh belum baiknya perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan masih tergantungnya nilai Rupiah terhadap US Dolar.

4. Pendapatan Daerah Regional Bruto

Variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto diproksikan dengan besaran Pendapatan Daerah Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Juta Rupiah.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rata-rata besar Pendapatan Daerah Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.4,717,313.37 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 3,583,068.30. Pendapatan Daerah Regional Bruto terendah adalah sebesar Rp. 1,470,909.36 yaitu pada kuartal ketiga tahun 2005 dan Pendapatan Daerah Regional Bruto tertinggi adalah sebesar Rp.11,734,149.56 yaitu pada kuartal keempat tahun 2014.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Pendapatan Daerah Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana Pendapatan Daerah Regional Bruto mempunyai besaran yang sangat fluktuatif dan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya perekonomian Indonesia yang berdampak terhadap PDRB daerah di Indonesia.

5. Inflasi

Variabel Inflasi diproksikan dengan besaran Inflasi di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan persen. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rata-rata besar Inflasi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 6.17% dengan nilai standar deviasi sebesar 1.24%. Inflasi terendah adalah sebesar 3.36% yaitu pada kuartal kedua tahun 2005 dan Inflasi tertinggi adalah sebesar 8.97% yaitu pada kuartal pertama tahun 2010.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Inflasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana Inflasi mempunyai besaran yang sangat fluktuatif dan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya perekonomian Indonesia yang berdampak terhadap tingkat inflasi daerah di Indonesia.

6. Besar Pengeluaran Pemerintah

Variabel Besar Pengeluaran Pemerintah diproksikan dengan besaran Nominal besaran pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan ribu Rupiah.

Berdasarkan berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai rata-rata besar Besar Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 172,061,898.62 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 38,574,914.28. Besar

Pengeluaran Pemerintah terendah adalah sebesar Rp. 109,250,484.72 yaitu pada kuartal kedua tahun 2005 dan Besar Pengeluaran Pemerintah tertinggi adalah sebesar Rp. 235,545,266.24 yaitu pada kuartal pertama tahun 2013.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Besar Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana Besar Pengeluaran Pemerintah mempunyai besaran yang sangat fluktuatif dan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya perekonomian Indonesia yang berdampak terhadap besaran pengeluaran pemerintah di Indonesia.

7. Infrastruktur

Variabel Infrastruktur diproksikan dengan besaran panjang jalan dengan kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Km.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rata-rata besar Infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 13,818.96 Km dengan nilai standar deviasi sebesar 983.96 Km. Infrastruktur terendah adalah sebesar 11,720.80 yaitu pada kuartal pertama tahun 2005 dan Infrastruktur tertinggi adalah sebesar 15,988.00 Km yaitu pada kuartal pertama tahun 2010.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana Infrastruktur mempunyai besaran yang sangat fluktuatif dan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh belum terfokusnya investasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah pada bidang pembangunan.

8. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi diproksikan dengan besaran persentase pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan persen.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rata-rata besar Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 3.95% dengan nilai standar deviasi sebesar 3.72%. Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah adalah sebesar -2.66% yaitu pada kuartal kedua tahun 2012 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi adalah sebesar 13.36% yaitu pada kuartal keempat tahun 2010.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi mempunyai besaran yang sangat fluktuatif. Hal ini masih belum menentukannya kondisi perekonomian Indonesia.

9. Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah diproksikan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Rupiah.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai rata-rata besar Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 330,997,795,871.97 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 136,214,786,548.30. Pendapatan Asli Daerah terendah adalah sebesar Rp.90,235,419,017.25 yaitu pada kuartal ketiga tahun 2008 dan PAD tertinggi adalah sebesar Rp. 631,742,038,663.55 yaitu pada kuartal ketiga tahun 2014.

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana Pendapatan Asli Daerah mempunyai besaran yang sangat fluktuatif dan cenderung besar pada kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal lainnya karena pendapatan utama daerah Provinsi Jawa Tengah masih lebih besar dari penerimaan pajak.

10. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja diproksikan dengan besaran tenaga kerja yang diserap pada sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan orang.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai rata-rata besar Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 191 orang dengan nilai standar deviasi sebesar 126 orang. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja adalah sebesar 2 orang yaitu pada kuartal pertama tahun 2012 dan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja tertinggi adalah sebesar 446 orang pada kuartal keempat tahun 2012

Selama periode 2005 sampai dengan 2015, Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan. Dimana Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja mempunyai besaran yang sangat fluktuatif. Fluktuatifitas ini disebabkan sektor kelistrikan masih belum menjadi sektor unggulan dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3 berikut menyajikan hasil olah data dan pengujian statistic terhadap kesesuaian teori dan hipotesis yang dirumuskan :

Tabel 3. Hasil Uji Kesesuaian Teori

| Hubungan antar variable | Pra estimasi | Pasca estimasi | Kesesuaian |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Model 1: Terdapat pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Pendapatan Daerah Regional Bruto, Inflasi, Besar Pengeluaran Pemerintah, dan Infrastruktur Terhadap Investasi Kelistrikan secara simultan | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| Model 2: Suku Bunga, Nilai Tukar, Pendapatan Daerah Regional Bruto, Inflasi, Besar Pengeluaran Pemerintah, dan Infrastruktur Terhadap Investasi Kelistrikan secara parsial. | | | |
| 1) Terdapat pengaruh Suku Bunga terhadap Investasi Sektor kelistrikan | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| 2) Terdapat pengaruh Nilai Tukar, terhadap Investasi Sektor kelistrikan | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| 3) Terdapat pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto terhadap Investasi Sektor kelistrikan | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| 4) Terdapat pengaruh Inflasi terhadap Investasi Sektor kelistrikan | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| 5) Terdapat pengaruh Besar Pengeluaran Pemerintah terhadap terhadap Investasi Sektor kelistrikan | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| 6) Terdapat pengaruh dan Infrastruktur terhadap Investasi Sektor kelistrikan | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| Model 3: Investasi Sektor kelistrikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonom | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| Model 4: Terdapat pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan asli daerah | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |
| Model 5: Terdapat pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | Pengaruh positif (+) | Pengaruh positif (+) | Sesuai |

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Sementara itu, table 4, menyajikan hasil uji olah data tentang kemampuan masing masing variable untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variable dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Kemampuan Menjelaskan Pengaruh Variabel

| Explanatory Ability | Standard Error | Coefficient | ½ Coefficient | Hasil Uji |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Model 1 : Terdapat pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Pendapatan Daerah Regional Bruto, Inflasi, Besar Pengeluaran Pemerintah, dan Infrastruktur Terhadap Investasi Kelistrikan secara simultan | | | | SE < ½ Coefficient |
| Model 2 : Terdapat pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Pendapatan Daerah Regional Bruto, Inflasi, Besar Pengeluaran Pemerintah, dan Infra-struktur Terhadap Investasi Kelistrikan secara parsial | | | | |
| 1) Terdapat pengaruh Suku Bunga terhadap Investasi Kelistrikan | 0.03000 | 0.01000 | 0,00500 | SE > ½ Coefficient |
| 2) Terdapat pengaruh, Nilai Tukar, terhadap Investasi Kelistrikan | 0.06300 | 0.11600 | 0,05800 | SE < ½ Coefficient |
| 3) Terdapat pengaruh Pendapatan Daerah Regional Bruto terhadap Investasi Kelistrikan | 0.03400 | 0.34400 | 0,17200 | SE < ½ Coefficient |
| 4) Terdapat pengaruh inflasi terhadap Investasi Kelistrikan | 0.01600 | 0.28900 | 0,14500 | SE > ½ Coefficient |
| 5) Terdapat pengaruh Besar Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Kelistrikan | 0.05400 | 0.45800 | 0,27900 | SE < ½ Coefficient |
| 6) Terdapat pengaruh Infrastruktur terhadap Investasi Kelistrikan | 0.04000 | 0.52500 | 0,262500 | SE < ½ Coefficient |
| Model 3: Terdapat pengaruh Investasi Sektor kelistrikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi | 0.10700 | 0.72300 | 0,365000 | SE < ½ Coefficient |
| Model 4: Terdapat pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah | 0.05300 | 0.72100 | 0.365000 | SE < ½ Coefficient |
| Model 5: Terdapat pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja | 0.10600 | 0.72400 | 0.36200 | SE < ½ Coefficient |

Hasil uji kemampuan menjelaskan seperti tampak pada Tabel 4. menunjukkan bahwa dari hampir seluruh variabel penelitian, besaran SE (*standard error*)-nya lebih kecil dari pada $\frac{1}{2}$ coefficient regresinya, hanya variabel Inflasi yang nilai SE (*standard error*)-nya lebih besar dari pada $\frac{1}{2}$ coefficient regresi. Namun nilai tidak begitu jauh dengan nilai $\frac{1}{2}$ coefficient regresi. Hal ini berarti bahwa setiap variabel memiliki kemampuan yang tinggi untuk menjelaskan hubungan antar-variabel yang diteliti.

Forecasting ability

Model memiliki tingkat kemampuan prediksi yang tinggi atas perilaku variabel terikat sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya koefisien determinasi (R^2) untuk kedua model yang melebihi 50 % dengan perincian sebagai berikut:

Model 1, Besarnya pengaruh pengaruh suku bunga, nilai tukar,

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan.

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan, dengan total pengaruh dari : suku bunga, nilai tukar, pendapatan daerah regional bruto, inflasi, besar pengeluaran pemerintah, dan infrastruktur terhadap investasi kelistrikan adalah 63,70 persen, dan sisanya 36,30 persen dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara masing-masing dari nilai tukar, pendapatan daerah regional bruto,

pendapatan daerah regional bruto, inflasi, besar pengeluaran pemerintah, dan infrastruktur terhadap investasi kelistrikan secara bersamaan, $R^2 = 63,70 \% > 50\%$.

Model 2, Besarnya pengaruh Investasi Sektor kelistrikan laju pertumbuhan ekonomi, yaitu $R^2 = 52,30 \% > 50\%$.

Model 3, Besarnya pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu $R^2 = 52,00 \% > 50\%$.

Model 4, Besarnya pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu $R^2 = 52,50 \% > 50 \%$.

Dengan demikian maka keempat model dalam penelitian yang dibangun tersebut, memiliki tingkat kemampuan prediksi yang tinggi atas perilaku variabel terikat.

inflasi, besar pengeluaran pemerintah, dan infrastruktur, sedangkan untuk tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini dikarenakan investasi sebagian besar di biayai oleh APBN, PLN, dan Investor asing yang tidak terikat oleh tingkat suku bunga perbankan dalam negeri.

3. Terdapat pengaruh signifikan dari Investasi kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dengan besaran Pengaruhnya sebesar 52,30 persen dan sisanya 47,70 persen dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan dari laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan asli daerah dengan besaran pengaruhnya sebesar 52,00 persen dan sisanya 48,00 persen dipengaruhi

variabel lain di luar variabel penelitian, diantaranya,

5. Terdapat pengaruh yang signifikan dari laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terhadap penyerapan tenaga kerja dengan besaran pengaruhnya sebesar 52,50 persen dan sisanya 47,50 persen dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian.

Saran - saran

1. Pemerintah merumuskan kembali berbagai kebijakan dan regulasi yang lebih kondusif, lengkap dan lebih operasional guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan investasi, yang di dukung oleh ketersediaan listrik yang memadai, mencukupi, berkualitas, murah dan terjangkau, serta memberikan daya dorong guna memberikan kemudahan untuk berinvestasi disektor kelistrikan di Indonesia, khususnya investor yang menanamkan modalnya dalam sektor kelistrikan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan berbagai tindakan yang konstruktif dalam menurunkan tingkat suku bunga yang relatif tinggi, menjaga stabilitas Nilai tukar (Kurs mata uang), Peningkatan PDRB, menjaga tingkat stabilitas inflasi, Peningkatan besaran pengeluaran pemerintah (anggaran pembangunan bidang kelistrikan), dan peningkatan ketersediaan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pihak perusahaan atau investor harus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia nya melalui peningkatan pendidikan yang lebih intensif dan peningkatan tingkat ketrampilan kerja pegawai, serta manajemem perusahaan yang lebih baik, sehingga mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan,

penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan manajemen kelistrikan guna meningkatkan kapasitas produksi listrik dan mampu meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sehingga mencapai tingkat kepuasan layanan.

4. Pihak pemerintah pusat / daerah, Pihak PLN dan pengusaha turut membantu perintisan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dengan pihak perbankan, lembaga keuangan dan asuransi, dan lembaga pengawasan, serta lembaga bisnis lainnya. Oleh karena itu pihak pemerintah harus memberikan fasilitas penjaminan dan dukungan lainnya yang memadai dan memberikan kemudahan dalam membangun kemitraan antara PLN dengan investor (pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil dan usaha mikro)
5. Seiring dengan upaya percepatan meningkatnya ketersediaan pasokan tenaga listrik di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dan meningkatnya tuntutan terhadap kepuasan konsumen, maka pihak pemerintah, PLN, pihak BUMN, pihak lainnya yang terkait, perlu koordinasi dan sinergisitas kelembagaan serta adanya upaya peningkatan kreativitas dan inovasi dalam aktivitas kerjanya dan produk yang dihasilkan serta adanya terobosan–terobosan dalam upaya peningkatan efisiensi, dan efektivitas kerja / usaha.
6. Dalam upaya lebih meningkatkan pendapatan perusahaan bidang kelistrikan, pemerintah pusat/ daerah, PLN, atau pihak terkait lainnya, harus memberikan jaminan kepastian usaha dan perlindungan usaha, menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai, memberikan fasilitas dalam

- mediasi dengan pihak - pihak yang terkait dengan pengembangan usaha, penjaminan ketersediaan dan kemudahan penyediaan lahan usaha (lahan perkantoran, lahan pembangkit listrik, lahan transmisi listrik dan lahan pendukung usaha).
7. Adanya kestabilan harga listrik dan keterjangkauan harga bagi konsumen serta adanya subsidi harga dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, usaha kecil dan mikro, serta yayasan/ lembaga/ LSM yang bergerak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan.
 8. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai, serta terciptanya Tripartet (Pemerintah pusat/ daerah, PLN, dan pengusaha/investor) yang harmonis dan dinamis, serta merancang tentang konsep strategi pengembangan industri kelistrikan yang berdaya saing yang tinggi (Cluster industrial strategic's).
 9. Pemerintah membuat suatu kebijakan yang dapat mendorong kerja sama dan penguatan diantara para investor yang langsung bergerak dalam sector inti bidang kelistrikan kelistrikan, dan investor yang bergerak dalam sector pendukung kelistrikan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang tinggi.
 10. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan bahan baku pembangkit listrik yang mudah dan murah serta aman, sehingga proses produksi listrik terjamin kelangsungan dalam satuan jangka waktu yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Jhingan, ML, 2006. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Kasmir, (2008). *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali
- Kodoatie, R.J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mangkoesebroto, G, 2008, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw N, Gregory, 2012, *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat
- Mudrajat Kuncoro,. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Mudrajad Kuncoro, dan Suhardjono. 2004. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE
- Novianto, Fajar Widayat. 2009. *Analisis Produksi Padi Organik Di Kabupaten Sragen Tahun 2008*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* Vol 10, No 2 (2009): JEP Desember 2009
- Prasetyo, Rindang Bangun dan Muhammad Firdaus, 2009. "Pengaruh Infrastruktur ada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ITB*, 2(2):222-236
- Sadono Sukirno. 2007. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian*

- Baru. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. Edisi Delapan Belas. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Todaro, Michael. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ke Tujuh. Jilid 1. Airlangga. Jakarta.
- Zulmi, Rizal, 2011, Pengaruh Luas Lahan, Tenaga Kerja, Penggunaan Benih dan Pupuk Terhadap Produksi Padi di Jawa Tengah Tahun 1994 – 2008, Fakultas Ekonomi, Universitas Dionegoro
- Yuyun Wirasmita, 2007, Kajian dan bahasan metodologi penelitian, Bandung, Universitas Padjajaran.
- SUMBER DATA DAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perkembangan Investasi di Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, tahun 2013. Jawa Tengah Dalam Angka
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, tahun 2014. Jawa Tengah Dalam Angka
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, tahun 2014. Perkembangan PDRB Jawa Tengah
- Bapeda Provinsi Jawa Tengah, 2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
- Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 yang di perbaharui oleh Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang - Undang No. 25 Tahun 1999 yang di perbaharui oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang - Undang No. 13 Tahun 2003. Tentang Ketenaga kerjaan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Investasi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang - Undang No. 14 Tahun 2014, Tentang Otonomi daerah, Jakarta: Sinar Grafika.